

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tanjung Pering Kabupaten Ogan Ilir Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendukung Pelayanan Publik Berbasis Digital

**Muhammad Nur Budiyanto¹, Andries Lionardo², Junaidi³,
Arrahman Syafebri⁴, Djunaidi⁵, Amma Fathuurrahmaan⁶, Alvina
Sevtiani⁷, Rizky Ghoffar Ismail⁸**

Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: nurbudiyanto@fisip.unsri.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 23, 2026

Revised Oktober 12, 2026

Accepted Oktober 15, 2026

Kata Kunci:

Identitas Kependudukan Digital,
Pelayanan Publik Digital, Aparatur
Desa, Literasi Digital

Keywords:

Digital Population Identity, Digital
Public Services, Village Officials,
Digital Literacy



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Muhammad Nur Budiyanto, et.al Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dalam memahami dan mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik berbasis digital. Kegiatan dilatarbelakangi oleh terbatasnya pemahaman mengenai IKD, keterampilan penggunaan aplikasi digital, optimalisasi digitalisasi pelayanan desa, serta belum tersedianya panduan teknis bagi aparatur dalam mendampingi masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, praktik penggunaan IKD, pelatihan digitalisasi pelayanan publik, pendampingan, diskusi, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan program. Kegiatan melibatkan tim dosen, mahasiswa, aparatur desa, dan masyarakat sebagai mitra. Hasil kegiatan secara kualitatif menunjukkan adanya penguatan literasi digital terkait fungsi IKD, alur penggunaan, peran aparatur sebagai fasilitator, serta penerapan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap teknologi. Pendampingan juga memperjelas kebutuhan mitra terhadap panduan praktis dan asistensi bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Program ini menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik desa memerlukan peningkatan kompetensi aparatur, komunikasi yang mudah dipahami, pendampingan berkelanjutan, dan panduan teknis yang kontekstual.

ABSTRACT

This community service program aimed to enhance the capacity of village officials and residents of Tanjung Pering Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency, in understanding and implementing Digital Population Identity (IKD) as part of strengthening digital-based public services. The activity was motivated by limited understanding of IKD, digital application skills, optimization of digital village services, and the absence of technical guidelines for village officials in assisting the community. The implementation method included needs identification, socialization, training, practical IKD use, digital public service training, mentoring, discussions, evaluation, and program sustainability efforts. The activities involved a team of lecturers, students, village officials, and community members as partners. The qualitative results indicated strengthened digital literacy regarding IKD functions, usage procedures, the role of village officials as facilitators, and the implementation of public services that are more adaptive to technology. The mentoring process also identified the partners' need for practical guidelines and assistance mechanisms for residents who are not yet familiar with digital services. This program demonstrates that digital transformation of village public services requires improved officials' competencies, accessible communication, continuous assistance, and contextual technical guidelines

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam pembaruan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pelayanan dilakukan dengan lebih cepat, terintegrasi, mudah ditelusuri, serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Dalam konteks administrasi kependudukan, pemerintah mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai representasi dokumen kependudukan dalam bentuk elektronik yang dapat diakses melalui perangkat digital. IKD diarahkan untuk mendukung modernisasi administrasi kependudukan, meningkatkan keamanan data, serta memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen identitas dan layanan publik. Kajian Zahro dan Wahyuni (2024) menempatkan transformasi KTP elektronik menuju identitas digital sebagai bagian dari perubahan tata kelola administrasi kependudukan yang semakin berbasis teknologi.

Implementasi kebijakan digital pada tingkat lokal, bagaimanapun, tidak selalu berjalan secara otomatis setelah aplikasi tersedia. Kesiapan masyarakat, kemampuan aparat, akses terhadap perangkat, pemahaman prosedur, dan dukungan pendampingan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan adopsi. Marfu'ah, Kumalasari, dan Swasanti (2024) menunjukkan bahwa ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan aplikasi IKD dapat menjadi hambatan bagi digitalisasi pelayanan publik. Temuan serupa mengenai kompleksitas implementasi IKD juga dikemukakan oleh Nafiah dan Oktariyanda (2024), yang menekankan bahwa penerapan identitas digital membutuhkan kesiapan organisasi, komunikasi kebijakan, serta dukungan teknis yang memadai.

Desa Tanjung Pering merupakan salah satu desa di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan dokumen proposal pengabdian, desa ini memiliki luas sekitar 29,75 km² dan dihuni sekitar 1.975 jiwa. Aktivitas ekonomi masyarakat antara lain bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kerajinan kerupuk kemplang. Di sisi pelayanan administrasi, aparat desa memiliki posisi strategis karena menjadi titik layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Posisi tersebut menjadikan kapasitas aparat dalam memahami layanan digital sangat menentukan kualitas adaptasi masyarakat terhadap inovasi administrasi kependudukan.

Hasil survei awal tim pengabdian mengidentifikasi tiga kelompok permasalahan. Pertama, pada aspek sosial masyarakat masih terdapat keterbatasan pemahaman tentang IKD dan keterampilan menggunakan aplikasi digital. Kedua, pada aspek pelayanan publik, proses pelayanan masih banyak mengandalkan mekanisme manual dan digitalisasi layanan belum optimal. Ketiga, pada aspek teknologi, belum tersedia panduan teknis penggunaan IKD yang dapat digunakan secara praktis oleh aparat desa, sementara pendampingan implementasi kepada masyarakat juga masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan teknologi, melainkan kemampuan organisasi desa dan masyarakat dalam menggunakannya secara efektif.

Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai intervensi peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Program memfokuskan kegiatan pada pemahaman konsep IKD, praktik penggunaan aplikasi, digitalisasi pelayanan publik, pemanfaatan panduan teknis, serta penguatan peran aparat desa dalam mendampingi masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai studi implementasi IKD yang menunjukkan perlunya komunikasi, pendampingan, dan strategi percepatan aktivasi di

tingkat masyarakat (Nurdiana & Ayumi, 2024; Romawati, Hendrati, & Wardaya, 2024; Imada et al., 2025).

Tujuan kegiatan adalah: meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat Desa Tanjung Pering tentang IKD; meningkatkan keterampilan penggunaan aplikasi digital khususnya IKD; memperkuat kapasitas aparaturnya dalam menerapkan digitalisasi pelayanan publik; dan menyediakan dasar panduan praktis yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Artikel ini memaparkan pelaksanaan kegiatan, pendekatan pendampingan, serta hasil proses yang dapat diamati dari kegiatan penguatan kapasitas tersebut.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan partisipatif dengan aparaturnya dan masyarakat Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir sebagai mitra sasaran. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat dan mitra sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi program (Mikkelsen, 2005). Metode kegiatan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra dan diarahkan pada tiga aspek prioritas, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD), peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, serta peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim dosen Universitas Sriwijaya dan lima mahasiswa yang berperan dalam pelaksanaan, dokumentasi, pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan dirancang secara bertahap agar proses peningkatan kapasitas tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan pengalaman praktik dan pendampingan kepada mitra. Setiap tahapan saling berkaitan, dimulai dari persiapan dan identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan pelatihan IKD, praktik penggunaan IKD dan pendampingan, pelatihan digitalisasi pelayanan publik, pemanfaatan panduan IKD dan penguatan peran aparaturnya, serta evaluasi dan penguatan keberlanjutan program. Rangkaian tahapan tersebut disusun untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan dapat dipahami, dipraktikkan, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi diatas, pelaksanaan metode pengabdian diarahkan pada proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas aparaturnya serta masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Tahapan kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mitra sehingga materi, praktik, dan pendampingan dapat diberikan secara kontekstual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap persiapan meliputi pembagian tugas tim, koordinasi dengan pemerintah desa, penentuan lokasi kegiatan, dan penelaahan kondisi awal mitra. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui survei awal, pertemuan dengan aparaturnya dan masyarakat, serta pemetaan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Identifikasi kebutuhan merupakan tahapan penting dalam perencanaan program pemberdayaan agar kegiatan yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan karakteristik kelompok sasaran (Kamil, 2012).

Berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan utama mitra meliputi peningkatan pemahaman mengenai IKD, keterampilan dalam menggunakan aplikasi digital, pemahaman mengenai digitalisasi pelayanan publik, tersedianya panduan penggunaan IKD, serta peningkatan kemampuan aparatur desa dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

2. Sosialisasi dan Pelatihan Identitas Kependudukan Digital

Tahap sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai penerapan IKD, manfaat identitas digital, serta keterkaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan. Materi pelatihan mencakup fungsi IKD, manfaat penggunaan dokumen kependudukan digital, tahapan penggunaan IKD, serta peran aparatur desa dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah, diskusi, dan praktik digunakan secara terpadu agar peserta memperoleh pemahaman sekaligus pengalaman dalam menerapkan materi yang diberikan (Sudjana, 2007).

3. Praktik Penggunaan IKD dan Pendampingan

Pelatihan dilanjutkan dengan praktik penggunaan IKD yang diarahkan pada pemahaman tahapan dan alur penggunaan aplikasi. Praktik dilakukan sebagai bentuk pembelajaran langsung sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi yang diperkenalkan.

Pendampingan dilakukan selama praktik untuk membantu peserta memahami setiap tahapan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Pendekatan praktik dan pendampingan diharapkan dapat membantu aparatur memahami prosedur penggunaan IKD sehingga selanjutnya mampu memberikan asistensi kepada masyarakat dengan tingkat literasi digital yang beragam.

4. Pelatihan Digitalisasi Pelayanan Publik

Pada aspek pelayanan publik, kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman aparatur mengenai prinsip dan penerapan digitalisasi pelayanan di lingkungan pemerintah desa. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan prosedur, ketepatan informasi, keamanan data, serta kesiapan aparatur dalam membantu masyarakat menghadapi kendala penggunaan layanan digital.

Materi dan diskusi dikaitkan dengan kondisi pelayanan desa yang masih menggunakan mekanisme manual pada beberapa jenis layanan. Dengan demikian, peserta didorong untuk memahami bahwa pemanfaatan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian prosedur pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur agar transformasi digital dapat berjalan secara efektif.

5. Pemanfaatan Panduan dan Penguatan Peran Aparatur

Penguatan keterampilan teknologi dilakukan melalui pemanfaatan panduan IKD yang disusun sebagai bahan praktis bagi aparatur desa. Panduan tersebut digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan tahapan penggunaan IKD dan membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan.

Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk mampu membaca dan memahami alur dalam panduan, menjelaskan kembali setiap tahapan, serta menggunakan panduan sebagai instrumen pendampingan. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi dapat ditransfer kepada masyarakat setelah kegiatan pengabdian selesai.

6. Partisipasi Mitra, Evaluasi, dan Keberlanjutan

Mitra berpartisipasi dalam kegiatan melalui penyediaan tempat, waktu, peserta, serta keterlibatan aktif dalam diskusi, pelatihan, dan praktik penggunaan IKD. Partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mitra.

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan selama proses kegiatan, diskusi, dokumentasi, dan kuesioner untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman dan kemampuan peserta. Namun, data kuantitatif hasil kuesioner tidak tersedia pada dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, hasil kegiatan dalam artikel difokuskan pada capaian proses yang dapat dideskripsikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan, observasi, dokumentasi, dan keterlibatan peserta.

Keberlanjutan program diarahkan pada pendampingan lanjutan, pemanfaatan panduan IKD oleh aparat desa, serta penguatan kapasitas aparat agar mampu memberikan asistensi kepada masyarakat secara mandiri. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pel

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparat Desa Tanjung Pering merupakan bagian dari upaya mendorong kesiapan pemerintah desa menghadapi transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan mempertemukan tim pengabdian Universitas Sriwijaya dengan aparat desa dan masyarakat dalam satu ruang pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman IKD dan pelayanan publik digital. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan keterlibatan peserta dalam kegiatan bersama, sementara banner kegiatan menegaskan fokus program pada implementasi Identitas Kependudukan Digital untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2026.

Temuan utama pada tahap pelaksanaan adalah bahwa kebutuhan penguatan kapasitas tidak hanya berada pada sisi teknis penggunaan aplikasi. Diskusi kegiatan menunjukkan pentingnya penyamaan pemahaman mengenai tujuan IKD, manfaat bagi masyarakat, serta peran aparat desa sebagai fasilitator. Hal ini relevan dengan persoalan yang telah diidentifikasi pada survei awal, yaitu keterbatasan pemahaman dan keterampilan digital. Dengan demikian, pelatihan ditempatkan sebagai proses membangun literasi kebijakan dan literasi teknologi secara bersamaan.

Dari aspek sosial masyarakat, materi mengenai IKD membantu peserta memahami bahwa identitas digital bukan sekadar pengganti fisik KTP, melainkan bagian dari ekosistem administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi. Pemahaman manfaat menjadi penting karena adopsi aplikasi akan sulit berkembang apabila masyarakat memandang IKD hanya sebagai kewajiban tambahan. Literatur menunjukkan bahwa ketidaksiapan masyarakat dapat menghambat digitalisasi layanan (Marfu'ah et al., 2024), sehingga komunikasi manfaat dan prosedur perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual.

Pada aspek keterampilan, praktik dan pendampingan berfungsi untuk memperkecil jarak antara pemahaman konseptual dengan penggunaan nyata. Aparatur desa perlu mampu mengikuti tahapan penggunaan sekaligus menjelaskan kembali prosedur kepada warga. Peran ini penting karena tidak semua warga memiliki tingkat literasi digital yang sama. Dalam konteks tersebut, aparatur desa bertindak sebagai titik bantuan pertama yang dapat mengurangi kebingungan pengguna, membantu memastikan informasi yang benar, serta mengarahkan masyarakat ketika diperlukan verifikasi atau bantuan lebih lanjut dari instansi kependudukan.

Pada aspek kualitas pelayanan publik, kegiatan menekankan perubahan orientasi dari layanan manual menuju layanan yang lebih adaptif terhadap teknologi. Digitalisasi pelayanan publik tidak berarti seluruh proses harus dipindahkan secara serentak ke kanal digital, tetapi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat. Bagi warga yang terbiasa menggunakan smartphone, layanan digital dapat mempercepat akses. Sebaliknya, warga yang memiliki keterbatasan perangkat atau keterampilan membutuhkan dukungan langsung. Karena itu, model pelayanan yang inklusif perlu mempertahankan fungsi aparatur sebagai pendamping sekaligus penghubung antara sistem digital dan kebutuhan warga.

Gambar 1. Dokumentasi Tim Pengabdian bersama Aparatur Desa Tanjung Pering



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026

Kegiatan juga memperkuat pentingnya panduan teknis sebagai instrumen keberlanjutan. Panduan IKD dapat mengurangi ketergantungan pada ingatan peserta setelah pelatihan selesai dan membantu menyeragamkan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pelayanan publik, konsistensi informasi merupakan unsur penting karena perbedaan penjelasan antartugas dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan pengguna. Dengan adanya panduan, aparatur memiliki rujukan praktis ketika menjelaskan fungsi, alur, dan tahapan penggunaan IKD.

Kebutuhan terhadap pendampingan berkelanjutan juga muncul sebagai bagian penting dari proses implementasi. Teknologi layanan pemerintah dapat mengalami perubahan fitur, prosedur, atau persyaratan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tidak sebaiknya dipandang sebagai kegiatan satu kali. Model yang lebih relevan adalah siklus sosialisasi, praktik, pendampingan, evaluasi, dan pemutakhiran informasi. Pendekatan

tersebut sejalan dengan studi implementasi IKD yang menekankan perlunya strategi organisasi dan komunikasi yang konsisten (Djano et al., 2024; Imada et al., 2025).

Dari sisi partisipasi, dokumentasi kelompok menunjukkan keterlibatan aparatur, masyarakat, dan tim pengabdian dalam rangkaian kegiatan. Interaksi langsung memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pengalaman yang tidak selalu muncul dalam penyampaian materi satu arah. Pendekatan partisipatif ini penting karena kendala implementasi layanan digital sering kali bersifat sangat kontekstual, misalnya perbedaan kemampuan menggunakan smartphone, akses jaringan, kebiasaan administrasi, dan pemahaman keamanan data. Diskusi langsung memungkinkan tim pengabdian menyesuaikan penjelasan dengan kebutuhan peserta.

Pelaksanaan kegiatan juga memperlihatkan adanya hubungan antara penguatan literasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aparatur yang memahami fungsi dan penggunaan IKD memiliki dasar yang lebih baik untuk memberikan penjelasan, membantu masyarakat, dan mengintegrasikan layanan digital ke dalam praktik administrasi desa. Meskipun artikel ini tidak memiliki data pre-test dan post-test yang dapat digunakan untuk menghitung besaran peningkatan kompetensi, capaian proses berupa terselenggaranya pelatihan, praktik, diskusi, pendampingan, serta penguatan panduan merupakan fondasi awal bagi perubahan tersebut.

Secara analitis, program di Desa Tanjung Pering menunjukkan bahwa transformasi digital di tingkat desa perlu dipahami sebagai proses pengembangan kapasitas kelembagaan, bukan semata adopsi aplikasi. Teknologi menyediakan instrumen, tetapi kualitas implementasi ditentukan oleh kompetensi pengguna, kejelasan prosedur, dukungan organisasi, komunikasi, dan keberlanjutan pendampingan. Pada konteks pelayanan administrasi kependudukan, keberhasilan IKD akan lebih kuat apabila aparatur desa mampu menjadi fasilitator yang responsif terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat kesiapan digital yang beragam.

Gambar 2. Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tanjung Pering



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2026

Ke depan, evaluasi program perlu dilengkapi dengan indikator yang lebih terukur, misalnya perubahan skor pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan, jumlah peserta yang mampu menjelaskan kembali prosedur, jumlah warga yang memperoleh pendampingan aktivasi, dan tingkat pemanfaatan panduan oleh aparatur. Data tersebut

akan memperkuat bukti dampak program serta membantu pemerintah desa menentukan bentuk pendampingan yang masih diperlukan. Selain itu, pemutakhiran panduan secara berkala penting dilakukan agar materi tetap sesuai dengan perubahan kebijakan maupun antarmuka aplikasi.

Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya terletak pada pelaksanaan pertemuan dan penyampaian materi, tetapi pada terbentuknya kerangka kerja pendampingan yang dapat diteruskan oleh aparatur desa. Kerangka tersebut mencakup penyampaian informasi yang benar, praktik penggunaan, bantuan bagi warga, pemanfaatan panduan, dan evaluasi. Apabila dilaksanakan secara konsisten, pendekatan ini dapat mendukung proses digitalisasi pelayanan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Simpulan

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, telah mengimplementasikan pendekatan pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat dalam memahami Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pelayanan publik berbasis digital. Kegiatan menjawab tiga kebutuhan utama mitra, yaitu keterbatasan pemahaman dan keterampilan digital, belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik, serta kebutuhan panduan teknis dan pendampingan implementasi. Melalui sosialisasi, diskusi, praktik, dan pemanfaatan panduan, peserta memperoleh ruang belajar yang menghubungkan konsep IKD dengan kebutuhan pelayanan di tingkat desa.

Hasil pelaksanaan secara kualitatif memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas aparatur merupakan unsur penting dalam keberhasilan transformasi pelayanan publik. Aparatur desa tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami dan mengakses layanan digital. Dokumentasi kegiatan menunjukkan keterlibatan aparatur, masyarakat, dan tim pengabdian dalam proses tersebut. Namun, karena data evaluasi kuantitatif pre-test dan post-test belum tersedia pada dokumen sumber, tingkat peningkatan kompetensi belum dapat dinyatakan dalam angka. Program lanjutan disarankan memanfaatkan indikator terukur, melakukan pemantauan berkala, dan memperbarui panduan sesuai perkembangan kebijakan serta aplikasi IKD. Keberlanjutan pendampingan akan menentukan sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diubah menjadi praktik pelayanan publik digital yang konsisten, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Daftar Pustaka

- Djano, R. H., Suryani, E. I., & Rahmaini, P. (2024). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penerbitan administrasi kependudukan digital di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2).
- Imada, A. K. P., Syafirlana, F. I., Nisa, K., Widyawati, L. M., & Aufa, R. A. (2025). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 313–329. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5800>.
- Kamil, M. (2012). *Model pendidikan dan pelatihan: Konsep dan aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi pelayanan publik: Ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 271–283. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>.
- Mikkelsen, B. (2005). *Methods for development work and research: A new guide for practitioners* (2nd ed.). New Delhi: SAGE Publications.
- Nafiah, N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Kompleksitas penerapan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam rangka pencatatan identitas kependudukan di Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 12(3), 705–714. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p705-714>.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i2.141>.
- Romawati, A., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Peningkatan cakupan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Wonorejo. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.515>.
- Sudjana, D. (2007). *Sistem dan manajemen pelatihan: Teori & aplikasi*. Bandung: Falah Production.
- Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). Transformasi E-KTP menjadi KTP digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 14(2), 63–71. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i2.245>.

